

**SKRIPSI**

fk  
pid 22/02  
war  
p

**PANCA WISNU WARDANA**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN)**



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

- CRIMINAL LAW  
- PORNOGRAPHY.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PORNOGRAFI  
DI INTERNET (CYBERPORN)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Didik Endro Purwoleksono S.H., M.H.**  
**NIP. 131 570 341**

**Penyusun,**



**Panca Wisnu Wardana**  
**NIM. 039714525**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

- a. Pornografi jelas merupakan tindak pidana, yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Internet merupakan salah satu bentuk media yang dapat digunakan oleh untuk menyebarkan pornografi, jadi *cyberporn* hanyalah salah satu feature yang ada di internet. Internet hanyalah bentuk media yang disalahgunakan penggunaannya, sehingga bukan internet yang harus dilarang, tetapi pelaku *cyberporn* itulah yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dapat menggunakan hukum positif Indonesia, yaitu KUHP, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk menjerat pelaku *cyberporn*.
- b. Pelaku *cyberporn*, baik pemilik/pengelola situs porno, foto model/aktor /aktris, dan produser yang terlibat dalam situs porno serta pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran/penyiaran situs porno (internet service provider/penyelenggara jasa), harus bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan perannya masing-masing atas tindak pidana *cyberporn*. Pengguna/pelanggan internet hanyalah korban (victim) dari pelaku *cyberporn*.
- c. Pemerintah sampai saat ini belum pernah mengeluarkan kebijakan yang melarang *cyberporn* di Indonesia. Tanpa adanya kebijakan tersebut, kinerja aparat penegak dalam menanggulangi *cyberporn* di Indonesia menjadi

terhambat. Untuk menanggulangi *cyberporn*, diperlukan adanya kerja sama dari aparat penegak hukum, pemerintah, serta peran serta masyarakat. Tanpa adanya kerja sama yang baik, penanggulangan *cyberporn* tidak akan dapat berjalan secara efektif, walaupun hukum positif Indonesia dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*.

## 2. SARAN

- a. Adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai dunia internet (*cyberlaw*), sehingga kebebasan informasi yang menjadi hak dari pengguna/pelanggan internet tidak disalahgunakan oleh pelaku *cyberporn*. Peraturan tersebut (*cyberlaw*) akan dapat digunakan sebagai rambu-rambu bagi pihak-pihak yang terlibat dalam internet, baik pemilik/penyelenggara situs, penyelenggara jasa, pengguna/pelanggan internet, serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan internet. Aparat penegak hukum pun diharapkan dapat bekerja lebih efektif dengan adanya *cyberlaw*, sehingga tidak ada keraguan untuk menindak tegas tindak pidana melalui media internet.
- b. Subyek hukum yang bertanggung jawab dalam tindak pidana *cyberporn*, tidak hanya perorangan/individu, tetapi juga badan hukum yang terlibat dalam internet. Perumusan yang jelas mengenai definisi kesusilaan, batasan pornografi dalam hukum positif Indonesia akan menghilangkan keragu-raguan aparat penegak hukum untuk membedakan sesuatu sebagai pornografi atau bukan.

Indonesia, sehingga aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Tanpa adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan aparat penegak hukum, penanggulangan *cyberporn* kurang dapat dilakukan dengan maksimal.

- d. Pers tidak mempunyai hak tolak untuk memberitahukan sumber-sumber informasi yang didapatnya. Jadi apabila aparat penegak hukum membutuhkan informasi yang berkaitan dengan *cyberporn*, maka pers harus memberitahukan sumber informasi yang didapatnya, untuk memudahkan penelusuran sumber informasi yang berkaitan dengan *cyberporn*.